

Jalan di Sekitar Istana Bogor Jadi Dua Arah

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota Bogor akhirnya memutuskan untuk kembali menerapkan dua arah di seputaran Istana Bogor. Hal itu dipilih menyusul adanya beberapa masukan dan hasil kajian di lapangan setelah penutupan Jembatan Otista.

"Rekayasa lalu lintas dengan kembali memberlakukan dua arah di beberapa titik SSA. Jadi, mulai Selasa malam pukul 21.00 WIB, skenario ini akan berjalan. Kami akan siapkan sarana prasarannya terkait dengan water barrier, penghilangan separator atau pulau jalan, dan penambahan lampu lalu lintas di daerah Kapten Muslihat," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam keterangannya, Selasa (9/5).

Titik yang akan menjadi dua arah yakni di Jalan Jalak Harupat atau sekitar Lapangan Sempur menuju Jalan Juanda. Kemudian kendaraan dari Jalan Juanda menuju Empang bisa berputar sebelum Jembatan Otista yang sedang dalam pembangunan. "Dan arah Balai Kota akan belok kiri, jadi tidak bisa crossing langsung ke Jalak Harupat, masuk ke Sudirman. Jadi pada intinya, skenario dua arah ini akan banyak menekankan perputaran ke kiri, menekuk ke kiri. Secara detail distribusi ini akan dibagikan mulai malam ini juga agar

warga bisa memahami itu dan menyesuaikan," ungkapnya.

Perubahan rekayasa lalu lintas ini merupakan hasil rapat Forkompimda Kota Bogor dan aspirasi dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya akan terus disempurnakan dan dievaluasi kembali. "Ini adalah jawaban kami atas aspirasi dari warga, untuk diberlakukan kembali dua arah setelah melalui berbagai kajian. Namun tentu konsep ini akan terus kita analisa di lapangan terkait dengan pelaksanaannya dan akan terus kami sempurnakan. Jadi intinya pertimbangan kami adalah untuk menyingkat waktu tempuh, mengurangi dampak ekonomi, dan menggerakkan kembali roda perekonomian dan lain-lain," jelasnya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya akan menyalakan persidangan selama 24 jam penuh. Hal ini untuk menegakkan disiplin lalu lintas. "Kita diskusikan, Forkompimda, ahli transportasi, masukan masyarakat, menghitung daerah sepi sehingga membagi keramaian. Kita siap pengamanan kelancaran arus lalu lintas," ujar Bismo. ● jay

8 | Nusantara



AKSES JALAN RUSAK MENUJU KAWASAN PEMDA KABUPATEN BOGOR

Sejumlah kendaraan melintasi jalan berlubang dan tergenang air di Jalan Raya KSR Dadi Kusmayadi, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/5). Akses jalan utama menuju kawasan Pemerintah Daerah Kab. Bogor tersebut rusak dan tergenang air sehabis hujan karena drainase yang buruk, dan belum diperbaiki meski telah rusak berbulan-bulan.

Jembatan Otista Bogor Akan Diperlebar, Diwacanakan Ada Jalur Trem dan Sepeda

Jembatan Otista dirobohkan dan dibangun kembali sebagai bentuk persiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan kehadiran perkeretaapian dalam kota atau trem. Mengingat, jembatan tersebut sudah hadir sejak zaman Belanda, dan sudah mengalami beberapa kali revitalisasi.

BOGOR (IM)- Jembatan Otto Iskandar Dinata (Otista) di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat saat ini dalam proses pembongkaran dan akan dibangun ulang dan nantinya dibuat lebih lebar. Jembatan yang menjadi bottleneck hingga memicu kemacetan menuju pusat Kota Bogor akan diperluas dan memiliki empat lajur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PUPR) Kota Bogor, Rena Da Frina, mengatakan, saat ini, jembatan eksisting yang dibongkar itu terdiri dua lajur dengan lebar 15 meter dengan trotoar di kiri kanan jalan. "Nah jembatan baru nanti akan jadi 22 meter, dengan empat lajur. Ada lajur sepeda, kemudian dikondisikan ada jalur trem," kata Rena di Kota Bogor, Selasa (9/5).

Rena menyebutkan, panjang Jembatan Otista nanti

nya juga akan berubah. Dari semula sepanjang 34 meter, keseluruhan menjadi 50 meter. Dia menjelaskan, perubahan panjang jembatan itu merupakan rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Hal itu karena di bawah jembatan terdapat aliran sungai yang menyempit tepat di bawah jembatan. "Saran dari BBWSCC supaya di-plongkan, jadi penampang sungainya kita keruk lagi supaya aliran sungainya lurus. Makanya ada penambahan jalan sampai 15 meter," jelas Rena.

Dia menjelaskan, Jembatan Otista dirobohkan dan dibangun kembali sebagai bentuk persiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan kehadiran perkeretaapian dalam kota atau trem. Mengingat, jembatan tersebut sudah hadir sejak zaman Belanda, dan sudah mengalami

beberapa kali revitalisasi.

"Kenapa kita tidak menambah jembatan untuk diperlebar? Kenapa harus dirobohkan? Nah, ketika jembatan itu kita paksakan untuk trem, itu gak akan bisa. Trem bobotnya 12-13 ton, itu nggak mampu," kata Rena memaparkan.

Selain itu, lanjut dia, opsi untuk menambah lebar jembatan juga tidak memungkinkan. Pasalnya, jembatan yang ada saat ini tidak akan mampu menahan beban dari alat berat yang dibutuhkan.

"Umur jembatan juga sudah semakin tua 40 tahun, nah kita kan mengadakan pembongkaran ini berharap memperpanjang umur jembatan sampai 100 tahun. Dengan kondisi perencanaan ke depan jalur transportasi trem bisa diakomodasi," kata Rena.

Latar belakang pembangunan Jembatan Otista ialah

karena jembatan itu menjadi sumber kemacetan di Kota Bogor. Sejak diberlakukan Sistem Satu Arah (SSA) di Kota Bogor, jembatan ini menjadi bottleneck dan kerap menyebabkan kemacetan panjang.

Berdasarkan kajian, tidak ada pilihan lain kecuali melebarkan Jembatan Otista untuk melancarkan arus lalu lintas. Sebetulnya pelebaran jembatan ini ingin dilakukan pada 2021, namun ditunda karena proses rasionalisasi sehubungan dengan sumber bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Untuk membangun Jembatan Otista, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Barat sekitar Rp 49 miliar. Adapun proses lelang sudah berlangsung dan dimenangkan oleh PT Mina Fajar Abadi. ● jay

Bukit Setinggi 350 Meter di Bogor Longsor, Ratusan Warga Diungsikan

BOGOR (IM)- Hujan deras selama sepekan terakhir menyebabkan bencana longsor di Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/5) dini hari. Perbukitan setinggi 350 meter mengalami longsor hingga mengancam permukiman warga di bawahnya.

Untuk mengantisipasi kondisi ini sekitar 300 jiwa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Eksodus ratusan warga Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai berlangsung sejak Selasa pagi. Warga meninggalkan rumah masing-masing untuk tinggal di lokasi pengungsian sementara yang berlokasi di komplek SDN Cibereum, Desa Buanajaya.

Warga memilih meninggalkan rumah mereka dan tinggal di pengungsian dengan jarak sekitar 2 kilometer dari rumahnya karena khawatir terdampak bencana longsor susulan di desa tersebut. Hingga Selasa siang warga masih berusaha mengevakuasi barang berharga dan menunggui ke tempat lebih aman.

Sebanyak 107 kepala keluarga terdampak langsung tanah

longsor dan 300 KK terancam melakukan pengungsian hingga siang. Longsor di Desa Buanajaya terjadi Senin malam hingga Selasa dinihari tadi akibat curah hujan tinggi selama sepekan terakhir.

Hujan menyebabkan kontur tanah labil, ditambah kondisi tebing perbukitan gundul. Tokoh warga Desa Buanajaya, Sudrajat mengungkapkan longsor terjadi secara bertahap namun kondisi paling parah terjadi semalam. Tebing perbukitan sepanjang 350 meter mengalami longsor hingga mendekati permukiman warga. "Dari atas longsor sekitar 350 meter, mendekati rumah warga. Tidak ada korban jiwa namun kondisi ini menakutkan," ungkap Sudrajat.

Sudrajat menambahkan ada dua sisi kampung yang sudah mulai terdampak yaitu di sebelah ujung barat dan timur perkampungan dengan kondisi timbunan materi longsor sudah mulai masih ke perumahan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam bencana ini karena warga masih terjaga saat longsor tiba. ● gio

IDN/ANTARA



EDUKASI UANG RUPIAH KEPADA PELAJAR SLB

Petugas memberikan pemahaman uang rupiah kepada pelajar penyandang disabilitas saat edukasi cinta, bangga dan paham rupiah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Jawa Tengah, Selasa (9/5). Edukasi uang rupiah oleh Bank Indonesia Tegal yang diikuti 180 pelajar Sekolah Luar Biasa (SLB) tersebut guna menumbuhkan pemahaman memberlakukan uang dengan baik dan menerapkan cinta bangga dan paham rupiah dalam kehidupan sehari-hari.

Sejumlah Kades di Purworejo Mundur, Ingin Jadi Caleg pada Pemilu 2024

PURWOREJO (IM)- Sejumlah kepala desa (Kades) di Purworejo, Jawa Tengah, mundur dari jabatannya. Kades itu diketahui akan mendaftar menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Aparatur Desa (DPPAP-MD) Kabupaten Purworejo, Iqbal Nugroho, menyebutkan, hingga kini sudah ada 4 kades yang menyampaikan surat pengunduran diri dengan alasan tersebut. "Yang sudah tercatat ada 4 kades sampai hari ini yang mengajukan surat pengunduran diri ke kami (Dinas)," kata Iqbal Nugroho, kemarin.

Tak hanya itu, menurutnya masih ada 4 orang lagi yang belum mengajukan surat pengunduran diri. Hal itu diketahui karena masih ada kades yang mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) untuk pencalegan di Polres Purworejo. "(8 orang) Ini yang tercatat sudah mengurus SKCK di Polres per 2 Mei kemarin, tapi yang sudah mengajukan masih 4 orang itu tadi," kata dia.

Diketahui, pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) bagi partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 telah dibuka. Pendaftaran dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo pada 1 hingga 14 Mei mendatang.

"Semuanya (jadi caleg) lewat partai yang bermacam-macam," kata Iqbal. Meski demikian, para bacaleg itu belum mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo. Hal itu terlihat sampai hari ke-8 pendaftaran, belum ada satu pun partai yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU Purworejo. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Widya Astuti mengatakan, masih nihilnya pendaftaran caleg disinyalir karena para bacaleg akan daftar pada hari-hari terakhir pendaftaran.

"Sampai hari ini masih belum ada yang mendaftarkan Bacalegnya di Pemilu 2024 mendatang," kata Widya. ● pra

Pemkab Bogor Akomodir Keinginan Buruh untuk Lebih Sinergi dengan Forkopimda

CIBINONG (IM)- Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor melakukan pertemuan dengan para serikat pekerja atau buruh Kabupaten Bogor.

Upaya tersebut dimaksudkan dalam rangka rangkaian kegiatan peringatan May Day sekaligus membahas beberapa usulan yang disampaikan oleh para serikat pekerja Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat VIII Setda Kabupaten Bogor, Senin (8/5) kemarin.

Turut hadir dalam kegiatan ini yakni, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanudin, Dandim 0621, Letkol Kav Gan Gan Ruscandara, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari.

Perlu diketahui kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan May Day. Ada empat tuntutan yang disampaikan para serikat pekerja Kabupaten Bogor, yang pertama meminta dicabutnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang kedua tolak Permenaker Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya.

Kemudian yang ketiga yakni melaksanakan notulen Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kabupaten Bogor. Keempat yakni lebih sinergi atau pererat pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor.

Berkaitan dengan LKS ada tiga poin yakni, yang pertama kaitan dengan perizinan di perusahaan yang terhambat, kedua terkait dengan pengupahan dan ketiga kaitan dengan rekrutmen pada pekerja khususnya di perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor.

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengapresiasi perjuangan dan upaya para serikat pekerja selama ini, mudah-mudahan pergerakan dari seluruh elemen dunia serikat pekerja ini bisa mendapatkan hasil yang diharapkan.

"Apa yang memang ingin diusulkan aspirasi dari teman-teman ini kami siap memfasilitasi baik itu ke Provinsi ataupun ke Pemerintah Pusat. Pada prinsipnya kami di Forkopimda ini ya tugasnya adalah melayani, siapapun mau kelompok apapun, golongan, suku dan agama, ras dan sebagainya wajib kita layani. Sebagai pelayan atau abdi masyarakat tidak boleh milih-milih," ujar Plt. Bupati Bogor.

Di tempat yang sama, Kapolres Bogor, AKBP Iman

Imanudin menuturkan, prinsipnya Polres Bogor senantiasa mendukung apapun itu yang sifatnya untuk kemajuan. Baik itu kemajuan investasi di Kabupaten Bogor ataupun kemajuan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bogor.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan buruh yang melaksanakan kegiatan aksi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. "Rencananya 17 Mei 2023 mendatang, kita akan melaksanakan silaturahmi, apalagi sekarang masih bulan Syawal sekaligus halal bihalal," jelas Zaenal.

Kemudian, Koordinator Aliansi Pekerja Buruh Bogor, DK Arif Kusnadi mengungkapkan bahwa, terkait kegiatan aksi hari ini ada beberapa tuntutan yang disampaikan terlebih masih dalam momentum peringatan May Day. Pihaknya meminta agar Pemerintah Kabupaten Bogor dapat mengabdikan apa yang menjadi tuntutan para rekan serikat pekerja.

"Syukur Alhamdulillah sih, kalau untuk aksi kegiatan kita pada hari ini diterima langsung oleh Plt. Bupati Bogor, pak Kapolres, pak Dandim, juga pak Sekda, pak Kadis dan jajaran. Apa yang menjadi tuntutan kita sudah dikabulkan," kata DK mengakhiri. ● gio



Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor melakukan pertemuan dengan para serikat pekerja atau buruh Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor mengakomodir keinginan buruh untuk bersinergi dengan Forkopimda.

Waspada, Kasus Covid-19 Alami Kenaikan di Kota Bandung

BANDUNG (IM)- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan kasus harian Covid-19 mengalami kenaikan kurun waktu April hingga awal Mei tahun 2023. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Kita menyadari hari-hari ini ada peningkatan kasus Covid-19 peningkatan kasus baru, keterisian tempat tidur ini sesuatu yang harus dicermati dan waspada tidak bisa diabaikan apalagi di beberapa daerah ada kematian meski ada komorbid," ujar Kepala Dinkes Kota Bandung, Anhar Hadian, Selasa (9/5).

Pada bulan Maret hingga April, penambahan kasus di bawah 10 kasus tiap hari. Namun, di awal Mei terdapat penambahan kasus tiap hari dari 30 sampai 60 kasus.

"Awal April dan Mei penambahan kasus harian antara 30 sampai 60 kasus. Rabu 3 Mei sampai 114 dari

situ terlihat ada penambahan harian," katanya.

Anhar melanjutkan kasus konfirmasi total di angka 300-350 kasus. Sedangkan keterisian tempat tidur mencapai delapan persen dari total tempat tidur yang ada. "Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan," katanya.

Terkait pencabutan status darurat Covid-19 di Indonesia oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), ia menghormati keputusan tersebut. Namun, Dinkes Kota Bandung belum mendapat arahan dari Kementerian Kesehatan untuk sikap di Pemkot Bandung. "Sampai saat ini Kemenkes belum mengeluarkan statement resmi terkait hal itu kecuali tentang vaksinasi yang harus ditingkatkan," katanya.

Anhar menambahkan surveilans terus dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19. Namun, saat ini proses surveilans relatif terdapat tantangan karena banyak yang tidak ingin dites Covid-19. ● pra

Tak Sampai Sebulan, Kejari Kab. Bogor Ringkus Dua Buronan

CIBINONG (IM)- Tak sampai sebulan, Kejaksan Negeri Kabupaten Bogor meringkus dua buronan. Siapa saja mereka?

Dua buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) itu adalah Hasan Sjafei dan Tiopan Martua Napitupulu. Keduanya sudah kabur dalam beberapa rentang waktu lamanya. Hasan Sjafei menjadi terpidana karena tersangkut pemalsuan sertifikat tanah. Korbannya adalah korporasi perumahan ternama di wilayah Kabupaten Bogor, PT Sentul City Tbk.

Sementara, Tiopan Martua Napitupulu diputus hukuman penjara selama dua tahun. Dia terbukti melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sejauh ini, sebut Kasi Intel Kejaksan Negeri Bogor, Makki, pihaknya memiliki

daftar enam buronan. Empat lainnya masih diuber.

Keberhasilan meringkus dua buronan ini menjadi catatan sendiri di Kejaksan Negeri Kabupaten Bogor. Pasalnya, Makki belum sebulan bertugas di Kabupaten Bogor, setelah sebelumnya menjadi Kasi Pidana Khusus Kejaksan Negeri Kota Sukabumi. "Alhamdulillah dalam kurun waktu 3 minggu, sudah 2 orang dari 6 orang DPO yang sudah kami tangkap," kata Makki kepada wartawan, Selasa (9/5).

Dia pun berjanji akan menguber empat buronan Kejaksan Negeri Kabupaten Bogor lainnya. Perburuan akan melibatkan pihak-pihak lainnya di kejaksan. Deri empat buronan Kejaksan Negeri Kabupaten Bogor, tiga di antaranya sudah berstatus sebagai terpidana. Sedangkan satu lainnya adalah terdakwa dalam kasus kredit fiktif. ● gio